

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
 Nomor P.37/MENHUT-II/2012
 TENTANG
 RENCANA KERJA KEMENTERIAN KEHUTANAN TAHUN 2013

KATA PENGANTAR



Menteri Kehutanan bersama Wakil Presiden Republik Indonesia, Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Walikota Depok di Persemaian Permanen Desa Jatijajar, Depok, Jawa Barat.

Renja Tahun 2013 ini merupakan dokumen perencanaan tahun ketiga dari periode Renstra Tahun 2010-2014, bertujuan untuk memandu pelaksanaan program dan kegiatan yang hasilnya ditunjukkan dengan adanya indikator kinerja.

Renja Tahun 2013 ini disusun melibatkan berbagai pihak yang difasilitasi melalui forum : rakorenbanghutda di seluruh provinsi, rakorenbanghutreg di 4 regional (Sumatera, Jawa-Bali-Nusra, Kalimantan, Sulawesi-Maluku-Papua),

dan musrenbangnas (pra musrenbangnas, musrenbangnas, pasca musrenbangnas). Indikasi sasaran dan anggaran di setiap provinsi juga telah disepakati dan dituangkan kedalam berita acara antara Kementerian Kehutanan, Bappeda provinsi dan Bappenas dalam forum pra musrenbangnas. Hal ini bertolak dari keinginan untuk mewujudkan dokumen perencanaan yang diakui seluruh pihak, guna mendorong pencapaian sasaran pembangunan kehutanan Tahun 2013.

Materi Renja tahun 2013 terdiri atas : capaian pembangunan kehutanan tahun 2011, tantangan dan arahan kebijakan, dan program dan kegiatan tahun 2013. Capaian pembangunan kehutanan 2011 disajikan *time series* sehingga dapat memberikan gambaran perbandingan kinerja Kementerian Kehutanan, antara lain : volume dan nilai ekspor, perkembangan pemenuhan bahan baku, populasi dari spesies yang terancam punah, perkembangan upaya rehabilitasi dan lain-lain.

Secara umum, program dan kegiatan Kementerian Kehutanan tahun 2013 termasuk pada prioritas ke-9 dari 11 prioritas Kabinet Indonesia Bersatu-Jilid II : Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana, utamanya terkait dengan substansi inti perubahan iklim dan pengendalian kerusakan lingkungan (*pro environment*). Namun demikian, program dan kegiatan pembangunan kehutanan juga diarahkan untuk membantu

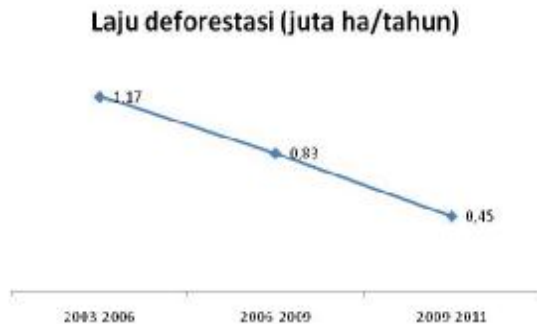
mengurangi kemiskinan (*pro poor*), pengurangan jumlah pengangguran (*pro job*) dan peningkatan pertumbuhan ekonomi (*pro growth*).

Akhirnya, semoga Allah SWT, melimpahkan rahmat dan karunianya bagi kita sehingga seluruh sasaran yang telah dirumuskan dapat dicapai. Amin

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN

RINGKASAN EKSEKUTIF



Keterangan gambar : (atas) alur air pasang hasil rehabilitasi di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah digunakan remaja untuk menjaring ikan; (bawah) tanaman mangrove hasil rehabilitasi di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.

Laju deforestasi dan degradasi berhasil diturunkan menjadi sebesar 0,45 juta ha/tahun pada periode 2009-2011. Upaya rehabilitasi hutan dan lahan yang telah rusak, berhasil menurunkan luas lahan kritis seluas 2,9 juta ha (angka tahun 2006 seluas 30,1 juta ha, tahun 2011 seluas 27,2 juta ha). Rehabilitasi dilakukan dalam rangka pemulihan kawasan dalam bentuk restorasi ekosistem, dan rehabilitasi lahan kritis (termasuk di dalamnya penanaman hasil KBR Tahun 2010). Upaya pemulihan ini juga diikuti dengan perkembangan HKm dan HD seluas 528.507 ha pada tahun 2010 dan 508.170 ha pada tahun 2011, serta HR seluas 50.651 ha di tahun 2011 (angka tahun 2010 seluas 51.506 ha).

Jumlah *hotspot* di Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, dan Pulau Sulawesi terus diturunkan. Hingga 31 Desember 2011 jumlah *hotspot* menurun sebesar 36% dari rerata *hotspot* tahun 2005-2009.

Populasi 14 spesies terancam punah meningkat dari kondisi tahun 2009, spesies yang melebihi target sebesar 1% di tahun 2011, yaitu : Banteng, Badak Jawa, Anoa, Owa Jawa, Bekantan, Jalak Bali, Maleo, Elang Jawa dan Kakatua Jambul Kuning. Spesies lainnya berhasil meningkat namun belum mencapai target. Terkait dengan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar, pada tahun 2011 mengalami peningkatan jumlah ijin, nilai investasi dan jumlah tenaga kerja yang terserap.



Dalam rangka meningkatkan pemanfaatan hutan, capaian pembangunan kehutanan adalah ekspor produk kehutanan meningkat menjadi 3,98 juta m³ pada tahun 2011 (tahun 2010 sebesar 2,7 juta m³). Produksi kayu pada tahun 2011 mencapai 43,71 juta m³, angka ini berkembang sejak tahun 2009 (37,5 juta m³) dan tahun 2010 (43,8 juta m³). Produksi kayu olahan tahun 2011 sebesar 6,8 juta m³ dan 6,2 ton pulp, meningkat dibanding tahun 2010. PNPB Kemenhut Tahun 2011 sebesar Rp.3,26 trilyun, meningkat dibanding tahun 2010 (Rp.3,03 trilyun). Sumbangan terbesar berasal dari DR, PSDH dan penggunaan kawasan hutan. Realisasi komitmen penyaluran dana bergulir untuk mendorong pembangunan HTR terus mengalami peningkatan. Tahun 2011 sebesar

Rp.30.007.545.490 dan tahun 2010 sebesar Rp.5.119.140.000 (kumulatif sebesar Rp.35.126.685.490,-).

Tantangan utama dalam meningkatkan produksi kayu di bidang kehutanan adalah belum seluruh kawasan hutan produksi terkelola dalam lembaga pengelola (KPHP). Hal ini mengakibatkan kawasan yang belum dibebani hak/izin seluas 43 juta hektar, menjadi rentan terhadap perambahan dan penebangan liar dan kegiatan liar lainnya seperti penambangan liar dan perkebunan liar. Belum selesainya tata batas dan belum beroperasinya KPH juga memberikan implikasi tidak optimalnya hasil pelaksanaan kegiatan kehutanan lainnya untuk peningkatan fungsi dan daya dukung DAS, rehabilitasi hutan dan lahan serta perlindungan hutan.

Pembangunan kehutanan tahun 2013 diarahkan untuk memperkuat pengelolaan hutan di tingkat tapak (dalam bentuk KPH) utamanya terhadap kawasan hutan produksi yang belum dibebani ijin dan hutan lindung. Hal ini diharapkan dapat mengurangi konflik kawasan (*land tenure*) dan meningkatkan investasi.

Sasaran strategis pembangunan kehutanan tahun 2013 (IKU Kemenhut tahun 2013), adalah : (1) terselesaikannya tata batas kawasan hutan (batas luar dan fungsi) sepanjang 19.000 km; (2) beroperasinya KPH sebanyak 30 unit; (3) data dan informasi geospasial dasar dan tematik kehutanan tingkat nasional sebanyak 1 judul; (4) areal tanaman pada

hutan tanaman bertambahnya sebesar 600.000 ha; (5) IUPHHK-HA/RE pada areal bekas tebangan (*logged over area*) seluas 650.000 ha; (6) produk industri hasil hutan yang bersertifikat legalitas kayu meningkat 10%; (7) hotspot di Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera dan Pulau Sulawesi berkurang 59,2% dari rerata 2005-2009, konflik dan tekanan terhadap kawasan TN dan kawasan konservasi lainnya (CA, SM, TB) dan HL menurun sebanyak 1%, serta kasus baru tindak pidana kehutanan (*illegal logging*, perambahan, perdagangan TSL, illegal, penambangan illegal dan kebakaran) penanganannya terselesaikan minimal sebanyak 60%; (8) populasi spesies prioritas utama yang terancam punah meningkat sebesar 2% dari kondisi tahun 2008 sesuai ketersediaan habitat; (9) rencana pengelolaan DAS terpadu di 2 unit DAS prioritas; (10) tanaman rehabilitasi hutan pada DAS prioritas seluas 100.000 ha, tanaman rehabilitasi lahan kritis pada DAS prioritas seluas 399.000 ha, serta terjamainnya hutan kota seluas 1000 ha; (11) terbangunnya HKm dan HD seluas 500.000 ha; (12) iptek dasar dan terapan bidang silvikultur, pengolahan hasil hutan, konservasi alam dan sosial ekonomi sebanyak 25 judul, sebesar 80%; (13) terbentuknya 13 kerjasama kemitraan melalui peningkatan peran serta pelaku utama dan pelaku usaha dalam pemberdayaan masyarakat; (14) diklat kepemimpinan, teknis dan administrasi kehutanan minimal sebanyak 3.000 orang; (15) penanganan perkara, pemulihan hak-hak negara bidang kehutanan minimal menang sebesar 64%; (16) mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan Kemenhut; dan, (17) kelemahan administrasi, pelanggaran terhadap peraturan perundangan dan hambatan kelancaran pelaksanaan tugas diturunkan sampai 40%, serta potensi kerugian negara dapat diturunkan hingga 20% dari temuan tahun 2006-2009.



Menteri Kehutanan di Hutan Pendidikan
Balai Diklat Kehutanan Rumpin, Bogor.

Indikator kinerja utama (IKU) pembangunan kehutanan tahun 2010-2014, sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.6/Menhut-II/2011, secara langsung memberikan sumbangan pada pilar pembangunan nasional, yaitu *pro poor*, *pro job*, *pro growth* dan *pro environment*. Lebih lanjut, perkembangan IKU Kemenhut disajikan sebagai berikut :

Perkembangan Sasaran Strategis (IKU) Kemenhut

Sasaran Strategis (IKU) Kemenhut	Renstra 2010-2014	Capaian Hingga 2011	Perkiraan Capaian Hingga 2012	Rencana 2013
Tata batas kawasan hutan meliputi batas luar dan batas fungsi kawasan hutan	63.000 km	8.514,83 km	24.514,83 km	19.000 km
Wilayah KPH ditetapkan di setiap provinsi dan beroperasinya (20% wilayah KPH yang telah ditetapkan)	120 KPH	21 KPH	60 KPH	30 KPH
Data dan informasi sumberdaya hutan tersedia	5 judul	2 judul	3 judul	1 judul
Areal tanaman pada hutan tanaman bertambah	2.650.000 ha	858.964 ha	1.358.964 ha	600.000 ha
Penerbitan IUPHHK-HA/RE pada areal bekas tebangan (LOA)	2.500.000 ha	875.850 ha	1.325.850 ha	650.000 ha
Produksi industri hasil hutan yang bersertifikat legalitas kayu meningkat	50%	46,79%	56,79%	10%
Jumlah <i>hotspot</i> kebakaran hutan menurun setiap tahun, dan penurunan konflik, perambahan kawasan hutan, <i>illegal logging</i> dan <i>wildlife trafficking</i> sampai dengan di batas daya dukung sumberdaya hutan	67,2% 5% 20% 75%	36% 3,2% 86,21% 51,83%	48,8% 4,2% 90,21% 66,83%	59,2%, 1%, 4% 15%
Populasi spesies prioritas utama yang terancam punah meningkat dari kondisi tahun 2008 sesuai ketersediaan habitat	3%	4,87%	5,37%	0,5%
Rencana pengelolaan DAS terpadu	108 DAS	70 DAS	106 DAS	2 DAS
Tanaman rehabilitasi pada lahan kritis di dalam DAS prioritas	2.500.000 ha	513.147 ha	1.013.147 ha	500.000 ha
Terbangunnya HKm dan HD	2.500.000 ha	1.036.677,9 ha	1.536.677,9 ha	500.000 ha
Penyediaan teknologi dasar dan terapan silvikultur, pengolahan hasil hutan, konservasi	100%	40%	60%	20%

alam dan sosial ekonomi guna mendukung pengelolaan hutan lestari sebanyak 25 judul				
Terbentuknya kerjasama kemitraan melalui peningkatan peran serta pelaku utama dan pelaku usaha dalam pemberdayaan masyarakat	50 kerjasama	21 kerjasama	31 kerjasama	13 kerjasama
Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparaturnya dan SM kehutanan lainnya	15.000 orang	8.910 orang	11.910 orang	3.000 orang
Penanganan perkara, pemulihan hak-hak negara bidang kehutanan menang di akhir tahun 2014	80%	32%	48%	(kumulatif 64%)
Opini laporan keuangan Kemenhut tahunan “wajib tanpa pengecualian” mulai laporan keuangan tahun 2011;	WTP	WTP	WTP	WTP
Kelemahan administrasi dan pelanggaran terhadap peraturan perundangan diturunkan, serta potensi kerugian negara diturunkan dari temuan tahun 2006-2009	50%	29,57%	39,57%	40%
	50%	4,19%	30%	40%
	25%	8,92%	15%	20%

DAFTAR SINGKATAN



Silvikultur intensif di PT. BFI, Kalimantan Timur.

Bappeda	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Bappenas	: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BMN	: Barang milik negara
BPKH	: Balai pemantapan kawasan hutan
BP2SDM	: Badan penyuluhan dan pengembangan SDM
BPDAS	: Balai pengelolaan DAS
BPDASPS	: Bina pengelolaan DAS dan perhutanan sosial

BUK	: Bina usaha kehutanan
CA	: Cagar alam
DAS	: Daerah aliran sungai
DAOPS	: Daerah operasional
Diklat	: Pendidikan dan pelatihan
Dishut	: Dinas kehutanan
DR	: Dana reboisasi
FEM	: <i>Food, energy, medicine</i>
HA	: Hutan alam
HD	: Hutan desa
HHBK	: Hasil hutan bukan kayu
HKm	: Hutan kemasyarakatan
HL	: Hutan lindung
HR (K)	: Hutan rakyat (kemitraan)
HT	: Hutan tanaman
HTI	: Hutan tanaman rakyat
HTR	: Hutan tanaman rakyat
IKK	: Indikator kinerja kegiatan
IKU	: Indikator kinerja utama
IPK	: Izin pemanfaatan kayu
IUPHHK	: Izin usaha pengelolaan hasil hutan kayu
KBR	: Kebun bibit rakyat
LAKIP	: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LH	: Lingkungan hidup
LHA	: Laporan hasil audit
LC	: <i>Land clearing</i>
Litbang	: Penelitian dan pengembangan



Pohon jati raksasa di CA Pagerwunung
Darupono, Jawa Tengah

LOA	: <i>Logged over areas</i>
Musrenbangnas	: Musyawarah pembangunan nasional
Kemenhut	: Kementerian Kehutanan
KPH	: Kesatuan pengelolaan hutan
Rakorenbanghutda	: Rapat koordinasi perencanaan pembangunan kehutanan daerah

Rakorenbanghutreg	: Rapat koordinasi perencanaan pembangunan kehutanan regional
RE	: Restorasi ekosistem
Renja	: Rencana kerja
Renstra	: Rencana strategis
RHL	: Rehabilitasi hutan dan lahan
RKTN	: Rencana kehutanan tingkat nasional
RPDAST	: Rencana pengelolaan DAS terpadu
Rtk	: Rencana teknik
PHKA	: Perlindungan hutan dan konservasi alam
RTRW	: Rencana tata ruang wilayah
PNBP	: Pendapatan negara bukan pajak
PPN	: Perencanaan Pembangunan Nasional
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
PSDH	: Provisi sumberdaya hutan
SDA	: Sumberdaya alam
SDH	: Sumberdaya hutan
SM	: Suaka margasatwa
SVLK	: Sistem verifikasi legalitas kayu
TB	: Taman buru
TN	: Taman nasional
TSP	: <i>Temporary sampling plot</i>
PSP	: <i>Permanent sampling plot</i>
UPT	: Unit pelaksana teknis

I. PENDAHULUAN

Capaian pembangunan 2011 : nilai dan jumlah eksport produk kehutanan; jumlah *hotspot* yang ditekan dan lokasi perambahan yang berhasil diselesaikan; spesies terancam punah yang populasinya telah ditingkatkan; jumlah KPH yang telah dibangun; kerjasama kemitraan yang telah dibangun dalam rangka pemberdayaan masyarakat; luas HKm dan HD yang telah dibangun; dan jumlah PNPB yang diterima.



Keterangan gambar (dari kiri-kanan) : Orangutan di TN. Kutai, Kalimantan Timur; KBR di Ternate, Maluku Utara; *view* di TN. Gn. Rinjani, Nusa Tenggara Barat; KHDTK Cikole, Jawa Barat; Enggang di TN. Kutai, Kalimantan Timur; *log yard* di PT. BFI, Kalimantan Timur; silvikultur intensif di PT. BFI, Kalimantan Timur; keramba kepiting di TN. Kutai, Kalimantan Timur.



A. UMUM

1. Mekanisme Penyusunan

Proses penyusunan Renja Kemenhut tahun 2013 diawali : (1) identifikasi capaian pembangunan kehutanan hingga tahun 2011, yang diukur dari pencapaian indikator kinerja kegiatan (IKK); dan (2) identifikasi isu-isu strategis dan arah pembangunan untuk menyelesaikan permasalahan dalam pencapaian IKK. Kedua hal ini dilakukan bersama antara Kemenhut dan Kemen PPN/Bappenas, sebagai dasar penentuan rancangan pembangunan tahun 2013, termasuk di dalamnya adalah penentuan insiatif baru dan mengawal pelaksanaan inisiatif baru tahun sebelumnya. Kegiatan ini dilakukan pada 13-14 Januari 2012.

Selanjutnya, hasil identifikasi dan rancangan tahun 2013 dikonsultasikan di setiap provinsi melalui Rakorenbanghutda melibatkan UPT Kemenhut, Dishut (atau dinas yang menangani urusan kehutanan) kabupaten/kota dan provinsi pada bulan Februari-Maret 2012, dan di tingkat regional (Rakorenbanghureg) pada bulan Maret-April 2012. Hasil dari identifikasi ini digunakan sebagai dasar pertemuan tiga pihak (Kemenhut, Kemen PPN/Bappenas dan Kemenkeu) untuk merancang indikasi capaian pembangunan kehutanan dan pagu indikatif, pada tanggal 10 April 2012.

Musrenbangnas yang diselenggarakan oleh Kemen PPN/Bappenas pada tanggal 25-26 April 2012 dihadiri oleh seluruh

Gubernur, para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II, Kadin dan Perguruan Tinggi, digunakan sebagai forum untuk menajamkan rancangan pembangunan sektor kehutanan. Acara ini didahului pertemuan tiga pihak (Kemenhut, Kemen PPN/Bappenas dan Bappeda Provinsi) untuk menyepakati capaian pembangunan kehutanan dan alokasi anggaran di seluruh provinsi (Pra Musrenbangnas) tanggal 16-21 April 2012.

Dengan demikian, dari keseluruhan proses ini diharapkan seluruh capaian pembangunan kehutanan 2013 menjadi bagian yang utuh dari pembangunan nasional (ditunjukkan dengan adanya RKP tahun 2013) yang prosesnya sejauh mungkin melibatkan pemangku kepentingan untuk meningkatkan partisipasi dalam pelaksanaannya.

2. Sistematika Penyajian

Renja Kemenhut tahun 2013 ini disajikan diawali dengan mekanisme penyusunan sehingga proses yang ditempuh dapat dipelajari dan diperbaiki kelemahannya, dan diketahui keterlibatan para pihak sehingga dapat memperluas dukungan dalam pembangunan kehutanan.



Bagian selanjutnya disampaikan Renstra Kemenhut tahun 2010-2014 untuk membawa arah dan kebijakan pembangunan kehutanan secara makro, dilengkapi dengan posisi dan dukungan pembangunan kehutanan dalam pembangunan nasional. Selanjutnya, disajikan capaian pembangunan kehutanan tahun 2011 untuk mengetahui perkembangan posisi pembangunan kehutanan tahunan. Hasil-hasil pembangunan sejauh mungkin tidak menampilkan hal-hal yang bersifat rutin, akan tetapi kinerja terkait adanya pelaksanaan tugas fungsi.

Bagian selanjutnya adalah tantangan yang ada dengan adanya capaian yang telah dihasilkan, sehingga membawa arah terhadap kinerja yang diharapkan di tahun 2013. Di bagian akhir disajikan komitmen dan arahan Menteri Kehutanan.

B. PENCAPAIAN HINGGA 2011 DAN PERKIRAAN PENCAPAIAN 2012



IKU pembangunan kehutanan tahun 2010-2014, sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.6/Menhut-II/2011, adalah : (1) Tata batas kawasan hutan sepanjang 25.000 km yang meliputi batas luar dan batas fungsi kawasan hutan (di dalam inisiatif baru disebutkan target tata batas menjadi 63.000 km); (2) Wilayah KPH ditetapkan di setiap provinsi dan beroperasinya 120 KPH (20% wilayah KPH yang telah ditetapkan); (3) Data dan informasi sumberdaya hutan tersedia sebanyak 5 judul; (4) Penambahan luas areal pencadangan ijin usaha pemanfaatan hutan tanaman (HTI/HTR) seluas 3 juta ha; (5) Penerbitan IUPHHK-HA/RE pada areal bekas tebangan (LOA) seluas 2,5 juta ha; (6) Produksi industri hasil hutan yang bersertifikat legalitas kayu meningkat sebesar 50%; (7) Jumlah *hotspot* kebakaran hutan menurun 20% setiap tahun, dan penurunan konflik, perambahan kawasan hutan, *illegal logging* dan *wildlife trafficking* sampai dengan di batas daya dukung sumberdaya hutan; (8) Populasi spesies prioritas utama yang terancam punah meningkat sebesar 3% dari kondisi tahun 2008 sesuai ketersediaan habitat; (9) Rencana pengelolaan DAS terpadu sebanyak 108 DAS prioritas; (10) Tanaman rehabilitasi pada lahan kritis di dalam DAS prioritas seluas 2,5 juta ha; (11) Terbangunnya HKm seluas 2 juta ha; (12) Terbangunnya HD seluas 500.000 ha; (13) Penyediaan teknologi dasar dan terapan silvikultur, pengolahan hasil hutan, konservasi alam dan sosial ekonomi guna mendukung pengelolaan hutan lestari sebanyak 25 judul; (14) Terbentuknya 50 kerjasama kemitraan melalui peningkatan peran serta pelaku utama dan pelaku usaha dalam pemberdayaan masyarakat; (15) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur Kemenhut dan SDM kehutanan lainnya minimal sebanyak 15.000 orang peserta; (16) Penanganan perkara, pemulihan hak-hak negara bidang kehutanan minimal menang sebesar 80% di akhir tahun 2014; (17) Opini laporan keuangan Kemenhut tahunan “wajaf tanpa pengecualian” mulai laporan keuangan tahun 2011; dan, (18) Kelemahan administrasi dan pelanggaran terhadap peraturan perundangan diturunkan sampai 50%, serta potensi kerugian negara diturunkan hingga 25%.

Hingga tahun 2011, pembangunan kehutanan telah berhasil menurunkan laju deforestasi dan degradasi menjadi sebesar 0,45 juta ha/tahun pada periode 2009-2011. Laju deforestasi dan degradasi hutan periode 2006-2009 sebesar 0,83 juta ha/tahun dan periode 2003-2006 sebesar 1,17 juta ha/tahun. Berikut ini disajikan capaian pembangunan kehutanan di setiap program pembangunan yang dilaksanakan oleh Kemenhut :

1. Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan



Untuk memantapkan kawasan hutan dan menurunkan lanju deforestasi dan degradasi hutan telah dilakukan penataan batas dan pembangunan KPH. Pada tahun 2011 telah dilakukan penataan batas luar dan batas fungsi sepanjang 5.148,83 km pada tahun 2011

(Tabel 1). Pada tahun 2012, target tata batas yang akan diselesaikan 16.000 km, meningkat signifikan dengan adanya kegiatan inisiatif baru. Hal ini diharapkan dapat menyelesaikan konflik pemanfaatan kawasan hutan dan penyelesaian RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/Kota.

Tabel 1. Capaian tata batas dan KPH

IKU	Target Renstra	Capaian 2010	Capaian 2011	Perkiraan 2012	Jumlah Hingga 2012
Tata batas	63.000 km	3.366	5.148,83	16.000	24.514,83
KPH	120	9	12	39	60

Sebagai arahan perencanaan makro penyelenggaraan kehutanan, arahan makro pemanfaatan dan penggunaan spasial atau ruang dan potensi kawasan hutan untuk pembangunan kehutanan dan di luar kehutanan telah diselesaikan RKTN Tahun 2011-2030 yang diterbitkan melalui Peraturan Menteri Kehutanan No. 49 Tahun 2011. Selanjutnya, sebagai tindak lanjut Inpres Nomor 10 Tahun 2011, Menteri Kehutanan telah melakukan penundaan izin seluas 65,28 juta ha berdasarkan Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (Revisi II).

2. Peningkatan Usaha Kehutanan

Perkembangan IUPHHK-HT cenderung meningkat dibandingkan IUPHHK-HA, hal ini sesuai dengan skenario *soft landing* yang lebih mengutamakan pemanfaatan kayu yang berasal dari hutan tanaman dibandingkan hutan alam. Perkembangan ini juga diikuti dengan adanya IUPHHK-RE dan IUPHHK-HTR. Hal ini sebagai bentuk kontribusi kehutanan dalam mengurangi laju deforestasi dan degradasi hutan alam.



Tabel 2. Capaian kinerja Program Peningkatan Usaha Kehutanan

IKU	Target RENSTRA	Capaian 2010	Capaian 2011	Perkiraan 2012	JumlahHingga 2012
Produksi hasil hutan kayu meningkat	5%	1%	0,84%	1%	2,84%

IKU	Target RENSTRA	Capaian 2010	Capaian 2011	Perkiraan 2012	JumlahHingga 2012
Penerbitan IUPHHK-HA dan atau RE pada LOA	2.500.000 ha	347.663	528.187 ha	450.000 ha	1.325.850 ha
Areal tanaman pada hutan tanaman	2.650.000 ha	457.758 ha	401.206	500.000 ha	1.358.964 ha
Areal hutan produksi tertata dalam unit-unit pengelolaan KPHP dan usaha pemanfaatan	100%	20%	20%	20%	60%
PNBP dari investasi pemanfaatan hutan produksi meningkat	10%	2%	2,14%	2%	6,14%
Produksi industri hasil hutan yang bersertifikat legalitas kayu	50%	8,57%	38,22%%	10%	56,79%

Ijin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu untuk kapasitas di atas 6.000 m³ meningkat dibanding tahun 2010. Pemenuhan bahan baku untuk industri secara nasional juga meningkat di tahun 2011 yaitu sebesar 47,4 juta m³, peningkatan ini berasal dari stock di IPHHK, IUPHHK-HTI dan hutan rakyat (Tabel 3).

Tabel 3. Perkembangan pemenuhan bahan baku

Komponen	Tahun		
	2009	2010	2011
Realisasi Pemenuhan Bahan Baku (m3)	37.590.339,67	44.256.753,95	47.424.309,19
a. Stock di IPHHK (m3)	2.763.664,72	2.086.987,09	4.348.848,99
b. IUPHHK-HA (m3)	4.642.569,29	5.285.445,07	5.088.695,42
c. IUPHHK-HTI (m3)	18.953.483,19	18.561.413,95	19.840.678,96
d. LC Penyiapan Lahan HTI (m3)	6.349.279,40	13.571.293,20	13.591.697,28
e. Perum Perhutani	87.827,81	98.002,96	104.776,60
f. ILS/IPK (m3)	482.781,59	736.727,23	600.597,53
g. Hutan Rakyat (m3)	3.204.735,56	2.769.547,53	2.831.619,62
h. Kayu perkebunan (m3)	595.460,71	469.264,47	428.239,51
i. Impor kayu bulat (m3)	12.482,33	46.618,38	9.782,76
j. Hasil Lelang (m3)	4.451,91	4.524,15	-
k. Pemilik/Pedagang Hasil Hutan KB	252.250,73	187.995,05	87.861,61
l. IPHHK Lain (m3)	238.275,29	438.934,87	491.510,93

Produksi kayu olahan tahun 2011 sebesar 6,8 juta m³ dan 6,2 ton pulp, meningkat dibanding tahun 2010, demikian halnya volume ekspor produk kehutanan. Pada tahun 2011 ekspor produk kayu sebesar 3,98

juta m³, sedangkan tahun 2010 sebesar 2,7 juta m³ (nilai ekspor pada Tabel 4).

Tabel 4. Perkembangan ekspor produk kehutanan

Komponen	Tahun		
	2009	2010	2011
Nilai ekspor produk kehutanan (US\$)	1.368.727.561	1.495.422.341	2.318.286.186
- Kelompok Kayu Gergajian (US\$)	25.090.385	19.666.877	32.378.632
- Veneer (US\$)	13.157.181	12.292.895	21.624.030
- Moulding (US\$)	248.364.665	283.313.733	406.850.678
- Papan Partikel (US\$)	1.529.544	1.850.063	1.283.172
- Papan Fiber Kayu (US\$)	14.481.954	10.150.633	13.045.351
- Kayu Lapis (US\$)	882.539.146	1.001.904.745	1.618.275.741
- Kayu yg dipadatkan (US\$)	-	-	-
- Peti, kotak, drum, pengemas (US\$)	2.376.192	2.674.160	3.882.386
- Kayu pertukangan (US\$)	178.795.431	163.148.291	218.965.361
- Produk kayu lainnya (US\$)	-	54.333	-
- Bangunan Prefabrikasi (US\$)	2.393.063	2.282.409	1.980.835

3. Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan

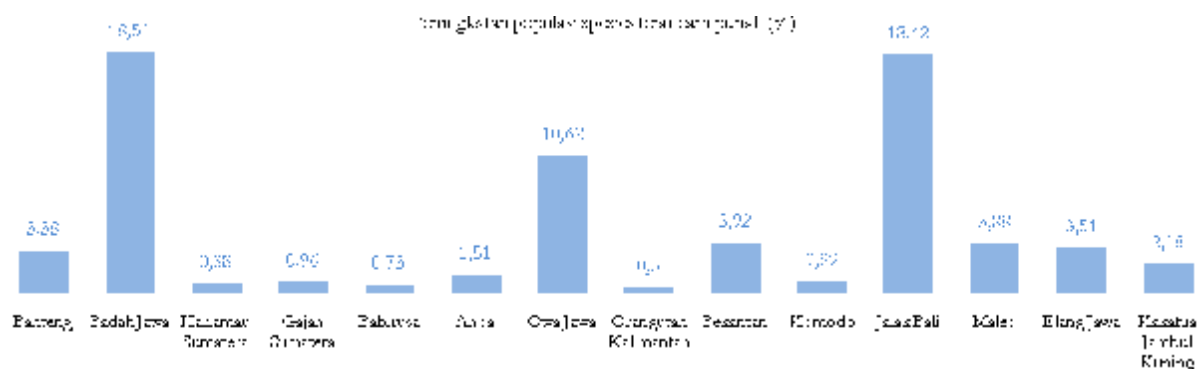


Upaya menurunkan konflik dan tekanan terhadap TN dan kawasan konservasi lainnya (CA, SM, TB, HL) telah dilakukan sebesar 3,20% (dari target 2% di tahun 2011). Selain itu, pengelolaan ekosistem esensial telah ditingkatkan sebesar 4%, penanganan perambahan 4% dan restorasi ekosistem di 5 lokasi (dari target 4 lokasi hingga 2014) (Tabel 5).

Tabel 5. Capaian pengelolaan ekosistem esensial dan penyelesaian perambahan

	2010	2011	2012 (Perkiraan hingga akhir tahun)
Pengelolaan ekosistem esensial	3 lokasi (Karst DIY dan Sulsel, Lahan basah di Danau Sentarum)	4 lokasi (forum kerjasama di SM Pulau Rambut, DKI; Pantai Timur, Jatim; Karst Sangkulirang, Kaltim; SM Jamursba Medi, Papua)	3 lokasi (Ekosistem mangrove untuk melindungi burung migran di Pulau Rupert, Riau; Ekosistem karst di Pangandaran, Ciamis, Jabar; Ekosistem lahan basah di Tulang Bawang, Lampung)
Penanganan perambahan di 12 provinsi	2 Lokasi (Riau dan Lampung)	2 lokasi (TN. BBS, Lampung dan SM Langkat Timur Laut, Sumut)	2 lokasi

Spesies terancam punah telah berhasil ditingkatkan populasinya, 9 diantaranya melebihi target, yaitu : Banteng, Badak Jawa, Anoa, Owa Jawa, Bekantan, Jalak Bali, Maleo, Elang Jawa dan Kakatua Jambul Kuning. Spesies lainnya berhasil meningkat namun belum mencapai target sebesar 1%.





Investasi pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar tahun 2011 sebesar Rp. 258,43 milyar, meningkat dibanding tahun 2010. Kondisi yang sama terjadi di lembaga konservasi, investasi meningkat menjadi Rp.183,7 milyar dibanding tahun 2010 sebesar Rp.177,1 milyar.

Jumlah *hotspot* terus diturunkan. Hingga 31 Desember 2011 jumlah *hotspot* menurun sebesar 36% dari rerata *hotspot* tahun 2005-2009. Seiring dengan penurunan jumlah *hotspot*, luas kawasan hutan yang terbakar berhasil ditekan pada tahun 2011 sebesar 42,22 persen (7.090,38 ha) dari rerata tahun 2005-2009 (12.272,67 ha).

PNBP perusahaan pariwisata alam pada tahun 2011 ditingkatkan menjadi Rp 22,2 miliar. Sebagai perbandingan, pada tahun 2008 PNPB sebesar Rp 5,9 miliar. Selain itu dalam rangka pengembangan pemanfaatan jasa lingkungan, dilakukan kerjasama/izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan air baru di TN Manupeu Tanadaru, TN Gunung Halimun Salak, TN Gunung Rinjani dan di TN Gunung Gede Pangrango.



4. Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung Daerah Aliran Sungai (DAS) berbasis Pemberdayaan Masyarakat

Upaya pemulihan hutan dan lahan telah berhasil mengurangi lahan kritis sebesar 2,9 juta ha (angka tahun 2006 seluas 30,1 juta ha, tahun 2011 seluas 27,2 juta ha). Upaya ini telah dilakukan antara lain rehabilitasi di kawasan hutan (termasuk di dalamnya restorasi ekosistem), dan rehabilitasi lahan kritis (termasuk di dalamnya penanaman hasil Kebun Bibit Rakyat Tahun 2010) (Tabel 6).

Tabel 6. Capaian rehabilitasi

	2010	2011	2012 (Perkiraan hingga akhir tahun)
Rehabilitasi hutan di DAS piroitas (ha)	-	100.743	100.000
Rehabilitasi lahan kritis di DAS prioritas (ha)		400.608	399.000
Pembuatan hutan kota (ha)	-	1.395	1.000
Rehabilitasi hutan mangrove/hutan pantai (ha)	-	10.401	Dimasukkan ke dalam target rehabilitasi lahan kritis



Untuk mewujudkan pengelolaan DAS terpadu, hingga tahun 2011, telah disusun RPDAST pada 70 DAS prioritas. Partisipasi dan akses masyarakat dalam produksi hasil hutan terus dilakukan melalui pengelolaan HKm dan HD, serta HR kemitraan (Tabel 7).

Tabel 7. Capaian HKM, HD dan HR

IKU	Target RENSTRA	Capaian 2010	Capaian 2011	Perkiraan 2012	JumlahHingga 2012
Pengelolaan pembangunan HKm dan HD	2.500.000 ha	528.507 ha	508.170,9 ha	500.000 ha	1.536.677,9 ha
Terfasilitasinya HR	250.000 ha	51.506 ha	50.651,89 ha	50.000 ha	151.157,89 ha

5. Penyuluhan dan pengembangan SDM kehutanan

Dalam rangka meningkatkan sasaran pemberdayaan masyarakat, pada tahun 2011 telah dibangun 21 kerjasama kemitraan. Sebanyak 19 kerjasama kemitraan antara industri dan kelompok masyarakat pada 19 perusahaan di



enam provinsi, yaitu Sumatera Utara, Jambi, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur . Sebanyak 1 kerjasama dilakukan dengan perguruan tinggi dan organisasi masyarakat.

Kelompok produktif masyarakat telah dibentuk sebanyak 95 kelompok di tahun 2011 (dari target 100 kelompok). Sertifikasi penyuluh juga dilakukan untuk meningkatkan kualitas penyuluhan bagi 209 orang, yang hasilnya 189 orang dinyatakan lulus dan berhak mendapatkan sertifikat.

Tabel 8. Kinerja Program Penyuluhan dan pengembangan SDM kehutanan

IKU	Target Renstra	Capaian 2010	Capaian 2011	Perkiraan 2012	JumlahHingga 2012
Kerjasama kemitraan	50 kerjasama	2 kerjasama	19 kerjasama	10 kerjasama	31 kerjasama
Kelompok masyarakat produktif mandiri	500 kelompok	14 kelompok	95 kelompok	100 kelompok	209 kelompok
Sertifikasi penyuluh	1.500 orang	-	209 orang	500 orang	709 orang
Diklat	15.000 orang	4.679 orang	4.231 orang	3.000 orang	11.910 orang
Pendidian menengah	1.425 orang	285 orang	285 orang	285 orang	855 orang

Selanjutnya untuk meningkatkan kualitas kerjasama, pada tahun 2011 telah dilakukan diklat pendampingan masyarakat sebanyak 5.000 orang. Jumlah ini yang secara signifikan memperbesar capaian untuk indikator dari target sebesar 3.000 orang menjadi 9.231 orang di tahun 2011 (diluar diklat pendampingan, capaian diklat aparaturnya dan non aparaturnya sebesar 4.231 orang).

6. Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kehutanan



Pada tahun 2011, Badan Litbang Kehutanan telah melaksanakan dan merealisasikan 5 kegiatan utama, yaitu : (1) Litbang konservasi dan rehabilitasi, yaitu hutan alam produksi lahan kering, hutan rawa gambut, hutan mangrove, konservasi flora, fauna dan mikro-organisme, model pengelolaan kawasan konservasi berbasis ekosistem, pengelolaan DAS dan pengelolaan sumberdaya lahan dan air pendukung DAS; (2) Litbang peningkatan produktivitas hutan, yaitu hutan tanaman kayu perkakas, hutan tanaman kayu pulp, hutan tanaman kayu energi, pemuliaan tanaman hutan, HHBK FEM (*food, energy dan medicine*) dan HHBK Non-FEM; (3) Litbang keteknikan kehutanan dan pengolahan hasil hutan, yaitu sifat dasar kayu dan HHBK, keteknikan dan pemanenan hasil hutan, pengolahan hasil hutan kayu, pengolahan HHBK dan perekayasa alat dan substitusi bahan pembantu; dan (4) Litbang perubahan iklim dan kebijakan, yaitu manajemen lansekap berbasis DAS, Hutan kota/lansekap perkotaan, ekonomi dan kebijakan REDD, perhitungan emisi GRK kehutanan, adaptasi bioekologi dan sosekbud terhadap perubahan iklim, tatakelola kehutanan dan tatakelola industri dan perdagangan hasil hutan .

7. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kehutanan

Kegiatan pengawasan terhadap keuangan dan kinerja telah dilakukan dengan keluaran sebanyak 342 LHA atau mencapai mencapai 124,36% dari rencana 275 LHA. Hasil dari pelaksanaan audit sesuai dengan IKU Inspektorat Jenderal disajikan pada Tabel 9.

Tabel 9. Perkembangan hasil audit

Komponen	Tahun	
	2010	2011
Pelanggaran terhadap peraturan perundangan	7,26%	4,19%
Hambatan terhadap pelaksanaan tugas pokok fungsi	13,46%	10,24%
Kelemahan administrasi	24,60%	29,57%
Potensi kerugian negara (Rp)	6,85%	8,92%



8. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kehutanan.

PNBP Kemenhut Tahun 2011 sebesar Rp.3,26 trilyun, meningkat dibanding tahun 2010 (Rp.3,03 trilyun) (Tabel 10).

Tabel 10. Perkembangan penerimaan negara bukan pajak

Komponen	Tahun		
	2009	2010	2011
Realisasi PNBP Kemenhut	2.397.581.426.000	3.027.118.614.216,93	3.258.234.428.088,75
1. PNBP SDA			
a. DR	1.455.081.056.972	1.635.335.683.648,93	1.720.288.868.765,89
b. PSDH	674.358.139.368	797.324.738.602,00	868.554.324.130,00
c. IIUPH	74.179.913.501	271.527.597.764,00	119.261.871.703,00
d. DPH	648.803.380	91.902.000,00	0,00
e. DPEH	418.686.800	135.238.800,00	4.254.460.392,00
f. IASL/TA	7.878.454.120	6.100.854.645,00	5.412.676.248,00

Komponen	Tahun		
	2009	2010	2011
g. Pungutan masuk Obyek WA	6.653.144.380	19.444.242.426,00	24.565.610.499,00
2. PNBP Lainnya			
a. Ganti Rugi Nilai Tegakan	0	33.869.834.201,00	97.295.159.593,00
b. Penggunaan Kawasan Hutan	169.536.525.729	175.854.019.948,00	315.672.169.228,00
c. Tempat Hiburan/Taman/Museum/PUPA	904.387.000	778.500,00	0,00
d. PIPPA	0,00	294.319.660,00	102.922.500,00
e. IHUPA	196.306.000	1.076.858.586,00	118.212.233,00
f. Pendapatan Lainnya	7.726.108.750	0,00	78.512.251,86

Jumlah perusahaan yang mengembalikan piutang untuk HTI meningkat di tahun 2011 (sebanyak 32 unit) dari tahun 2010 (28 unit). Kondisi yang sama terjadi tahun 2011 untuk piutang dalam bentuk KUK DAS, KUHR dan KUPA (Tabel 11). Realisasi komitmen penyaluran dana bergulir untuk mendorong pembangunan HTR terus mengalami peningkatan. Tahun 2011 sebesar Rp.30.007.545.490 dan tahun 2010 sebesar Rp.5.119.140.000. Dengan demikian, secara kumulatif, realisasi komitmen penyaluran sebesar Rp.35.126.685.490,-.

Tabel 11. Perkembangan penyelesaian piutang

Komponen	Tahun		
	2009	2010	2011
Penyelesaian Piutang			
1. HTI			
a. Jumlah PHTI (unit)	92	92	92
b. Realisasi Penyaluran (Rp)	1,139,117,857,705.60	1,139,117,857,705.60	1.139.117.857.705,60
c. Realisasi Pengembalian (Rp)	1,047,721,745,690.87	1.128.228.850.164,10	1.192.432.804.786,61
d. Jumlah Pengembalian (unit)	23	28	32
e. Sisa Pinjaman (Rp)	1,091,866,283,253.19	1.044.483.498.249,68	1.002.066.672.579,56
2. KUK DAS, KUHR, KUPA			
a. Realisasi Penyaluran (Rp)	199,742,968,388	199,658,247,728.46	201.782.786.790.12
b. Realisasi Angsuran (Rp)	15,224,327,281.70	30,495,883,244.50	81.663.007.815.58
c. Sisa Pinjaman (Rp)	184.518.641.106,20	169,162,364,483.83	167.995.359.152,89

Komponen	Tahun		
	2009	2010	2011
3. PSDH dan DR			
a. Jumlah Tunggalan (Rp)	317,891,923,289. 62	317,891,923,289. 62	955.496.416.810, 20
b. Realisasi Pembayaran (Rp)	0	0	218.930.304.290, 94

C. SUMBERDAYA MANUSIA

Kemenhut memiliki pegawai sebanyak 17.456 orang (per Juni 2012), yang komposisinya : 121 orang (0,7%) berpendidikan S3, S2 sebanyak 1501 orang (8,6%) , S1/D4 sebanyak 5.290 orang (30,3%), D3 sebanyak 1.136 orang (6,5%), SLTA sebanyak 8.588 orang (42,9%), SLTP sebanyak 427 orang (2,4%) dan SD sebanyak 393 orang (2,3%) . Komposisi pegawai berdasarkan golongan di tampilkan pada Tabel 12.

Selain itu di tingkat lapangan terdapat sumberdaya manusia non aparatur kehutanan yang eksistensinya berperan nyata dalam keberhasilan pembangunan kehutanan. Sebagai contoh adalah penyuluh kehutanan swadaya masyarakat (PKSM) sebanyak 2.505 orang, Manggala Agni, pengaman hutan swakarsa, kader konservasi, kelompok tani hutan (KTH) sebagai pelaku utama kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, dan lain-lain.

Tabel 12. Komposisi pegawai

Unit Kerja	Golongan				Jumlah	Total
	IV	III	II	I		
Pusat						3.482
• Laki-laki	432	1.379	416	54	2.281	
• Perempuan	147	903	149	2	1201	
UPT						13.773
• Laki-laki	360	5.976	4530	257	11.123	
• Perempuan	77	1.846	713	14	2.650	
BUMN						201
• Laki-laki	9	98	64	7	178	
• Perempuan	1	14	8	0	23	
Jumlah						17.456
• Laki-laki	801	7.453	5.010	318	13.582	
• Perempuan	225	2.763	870	16	3.874	

Hingga saat ini, Kemenhut masih kekurangan pegawai sebanyak 8.550 orang, namun berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan Nomor 02/SPB/M.PAN-RB/8/2011, 800-632 Tahun 2011 dan 141/PMK.01/2011 tentang Penundaan Sementara Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil, bahwa

dalam rangka penataan PNS dan penghematan anggaran belanja pegawai dilakukan penundaan sementara penetapan tambahan formasi untuk penerimaan CPNS terhitung sejak 1 September 2011 sampai dengan 31 Desember 2012, sehingga tidak terdapat penerimaan CPNS Kemenhut untuk tahun 2011 dan 2012. Lebih lanjut, kekurangan pegawai tersebut akan diusulkan ke Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk tahun 2013.

Hasil konsultasi dengan Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait dengan penundaan sementara penerimaan calon (PNS) yang dituangkan dalam Peraturan Bersama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan tanggal 24 Agustus 2011, yang termasuk kategori jabatan khusus dan mendesak dapat dikecualikan. Jabatan khusus dan mendesak itu adalah fungsional Polisi Kehutanan, fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dan fungsional Penyuluh Kehutanan.

II. TANTANGAN DAN SASARAN 2013

Tantangan kedepan : (1) belum adanya pengelolaan hutan di tingkat tapak yang mengakibatkan penebangan liar, perambahan serta kegiatan penambangan dan perkebunan liar; (2) konflik kawasan, mengakibatkan minat investasi kurang.



Keterangan gambar (dari kiri-kanan) : pembukaan kawasan di TN. Kutai, Kalimantan Timur; penebangan liar di TN. Betung Kerihun, Kalimantan Barat; kebun bibit di PT. BFI, Kalimantan Timur; kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah; Enggang Klihingan di TN. Kutai, Kalimantan Timur.



A. TANTANGAN DAN STRATEGI

Tantangan utama yang dihadapi adalah peningkatan jumlah penduduk yang berakibat pada peningkatan kebutuhan akan lahan, serta semakin tingginya harga beberapa komoditas (kakao, sawit, karet dan bahan tambang). Hal ini memicu adanya : (1) Konflik lahan dengan masyarakat terkait dengan perambahan, serta penggunaan kawasan hutan non prosedural; (2) Kebakaran hutan dan lahan; (3) berbagai bencana seperti banjir dan tanah longsor; dan, (4) Adanya kampanye yang menghalangi ekspor hasil hutan Indonesia termasuk pulp dan kertas, dengan memojokkan aspek lingkungan pengelolaan hutan Indonesia.

Hutan produksi yang belum dibebani hak/izin (*open access*) juga rentan terhadap perambahan dan penebangan liar dan juga kegiatan liar lainnya seperti penambangan liar dan perkebunan liar. Sementara itu, penegakan



hukum atas pelanggaran-pelanggaran di bidang kehutanan belum optimal. Selain itu, tata batas yang belum selesai juga menyebabkan ketidakjelasan status kawasan hutan. Hal ini memicu konflik kawasan hutan antara pemerintah dengan swasta dan masyarakat. Selain itu, tata batas yang belum definitif menghambat persetujuan substantif untuk penyelesaian rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten.

Tantangan lainnya adalah kesenjangan kompetensi SDM kehutanan dalam mengawal kinerja pembangunan di tingkat lapangan.

Upaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tantangan di atas adalah mendorong pengelolaan di tingkat tapak dalam bentuk kesatuan pengelolaan hutan (KPH) dan percepatan penataan batas kawasan hutan. Hingga 2014, akan didorong penyelesaian penataan batas seluruh kawasan hutan di Indonesia dan mendorong beroperasinya 120 KPH. Upaya ini secara langsung diharapkan dapat mendorong minat investasi di bidang kehutanan karena terkait dengan kepastian usaha di bidang kehutanan, mengurangi konflik kawasan hutan antara pemerintah dengan



swasta dan masyarakat. Selain itu, akan didorong persetujuan substantif untuk penyelesaian rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten.

Untuk menangkal upaya negara pesaing menghalangi ekspor hasil hutan, dilakukan kampanye tandingan guna meluruskan pandangan sebagian kalangan internasional yang kurang memahami dinamika kebijakan pembangunan kehutanan Indonesia yang *pro growth, pro job, pro poor* dan *pro environment*, antara lain keberhasilan mengembangkan SVLK.

B. SASARAN 2013

Sasaran pembangunan untuk peningkatan produksi di bidang kehutanan adalah: (i) HP tertata ke dalam unit-unit pengelolaan berupa KPHP di 18 provinsi, (ii) produksi hasil hutan kayu dan HHBK/jasa lingkungan meningkat sebesar 1%, (iii) IUPHHK-HA/RE pada *logged over area* seluas 650.000 ha, (iv) areal pencadangan ijin usaha pemanfaatan hutan tanaman seluas 750.000 ha dan bertambahnya areal tanaman pada hutan tanaman seluas 600.000 ha, (v) pemenuhan bahan baku dari hutan tanaman dan limbah meningkat sebesar 15%, (vi) terbangunnya HKm dan HD seluas 500.000 ha, (vii) terbangunnya HR kemitraan untuk bahan baku kayu industri pertukangan seluas 50.000 ha, (viii) sertifikasi

penyuluh kehutanan sebesar 500 orang, dan (ix) terselenggaranya pendidikan dan pelatihan aparatur Kemenhut dan SDM kehutanan lainnya sebanyak 3.000 orang.

Untuk peningkatan konservasi dan rehabilitasi sumber daya hutan, sasaran pembangunan adalah: (i) terselesaikannya tata batas kawasan hutan (batas luar dan fungsi) sepanjang 19.000 km, (ii) beroperasinya KPH sebanyak 30 unit, (iii) meningkatnya hasil rehabilitasi hutan dan lahan seluas 500.000 ha, dan (iv) penyusunan Rencana Pengelolaan DAS Terpadu di 2 DAS prioritas. Sasaran pembangunan lainnya adalah: (v) menurunnya konflik dan tekanan terhadap TN dan kawasan konservasi lainnya (CA, SM, TB, HL) sebesar 1%, (vi) meningkatnya populasi spesies prioritas utama yang terancam punah sebesar 0,5%, dan (vii) menurunnya *hotspot* di Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, dan Pulau Sulawesi sebesar (kumulatif) 59,20% dan luas kebakaran hutan sebesar 40%, masing-masing dari rerata tahun 2005-2008.

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2013

IKU Kemenhut tahun 2013 adalah : (1) Tata batas kawasan hutan (batas luar dan fungsi) sepanjang 19.000 km; (2) Beroperasinya KPH sebanyak 30 unit; (3) Data dan informasi geospasial dasar dan tematik kehutanan terkini tingkat nasional sebanyak 1 judul; (4) Penambahan luas areal



pengcadangan ijin usaha pemanfaatan HTI/HTR seluas 750.000 juta ha; (5) Penerbitan IUPHHK-HA/RE pada *logged over area* seluas 650.000 ha; (6) Produk industri hasil hutan yang bersertifikat legalitas kayu meningkat 10%; (7) Jumlah *hotspot* di Pulau Kalimantan-Sumatera-Sulawesi turun sebesar (kumulatif) 59,20% dan luas kebakaran hutan turun (kumulatif) sebesar 40%, serta menurunnya konflik dan tekanan terhadap TN dan KK lainnya sebesar 1%; (8) Populasi spesies prioritas utama yang terancam punah meningkat sebesar 0,5%; (9) Rencana Pengelolaan DAS Terpadu di 2 DAS prioritas; (10) Tanaman rehabilitasi hutan seluas 100.000 ha, rehabilitasi lahan kritis seluas 399.000 ha dan hutan kota seluas 1000 ha; (11) Terbangunnya HKm seluas 400.000 ha; (12) Terbangunnya HD seluas 100.000 ha; (13) Penyediaan teknologi dasar dan terapan silvikultur, pengolahan hasil hutan, konservasi alam dan sosial ekonomi

guna mendukung pengelolaan hutan lestari sebanyak 25 judul, terselesaikan 80%; (14) Terbentuknya 13 kerjasama kemitraan melalui peningkatan peran serta pelaku utama dan pelaku usaha dalam pemberdayaan masyarakat; (15) Penyelenggaraan diklat aparatur Kemenhut dan SDM kehutanan lainnya sebanyak 3.000 orang; (16) Penanganan perkara, pemulihan hal-hak negara bidang kehutanan minimal menang sebesar 64%; (17) Opini laporan keuangan Kemenhut 'wajar tanpa pengecualian'; (18) Kelemahan administrasi dan pelanggaran terhadap peraturan perundangan berkurang sampai 40%, serta potensi kerugian negara dapat diturunkan hingga 20%, dari temuan tahun 2006-2009.

III. PROGRAM DAN KEGIATAN 2013

Arah kebijakan, prioritas nasional dan prioritas bidang, pengarusutamaan gender, program dan kegiatan, serta indikator kinerja tahun 2013



Keterangan gambar (dari kiri-kanan) : TWA. Grojogan Sewu, Tawang Mangu, Jawa Tengah; patok batas di CA Celering, Jawa Tengah; pohon jati raksasa di CA Pagerwunung Darupono, Jawa Tengah; pendidikan lingkungan untuk pelajar SD di TN. Kutai, Kalimantan Timur; silvikultur intensif di BFI, Kalimantan Timur; sosialisasi persiapan REDD+ FORCLIME FC-Module di Long Okeng, Berau, Kalimantan Timur.

A. ARAH KEBIJAKAN

Posisi pembangunan kehutanan di dalam 11 prioritas Kabinet Indonesia Bersatu-Jilid II, termasuk pada prioritas ke 9 : Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana, terkait dengan substansi inti perubahan iklim dan pengendalian kerusakan lingkungan (Tabel 13). Selain itu, program dan kegiatan pembangunan kehutanan juga diarahkan untuk membantu mengurangi kemiskinan (*pro poor*), pengurangan jumlah pengangguran (*pro job*) dan peningkatan pertumbuhan ekonomi (*pro growth*).

Tabel 13. Prioritas nasional pembangunan kehutanan 2013

Prioritas 9 : LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN BENCANA

Tema Prioritas : Konservasi dan pemanfaatan lingkungan hidup mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang keberlanjutan, disertai penguasaan dan pengelolaan risiko bencana untuk mengantisipasi perubahan iklim.

Substansi Inti : Perubahan Iklim

Peningkatan keberdayaan pengelolaan lahan gambut, peningkatan hasil rehabilitasi seluas 500,000 ha per tahun, dan penekanan laju deforestasi secara sungguh-sungguh diantaranya melalui kerjasama lintas kementerian terkait serta optimalisasi dan efisiensi sumber pendanaan seperti dana Iuran Hak Pemanfaatan Hutan (IHPH), Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), dan Dana Reboisasi

Kegiatan Prioritas	Sasaran
Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, dan Reklamasi Hutan di DAS Prioritas	Berkurangnya lahan kritis melalui rehabilitasi dan reklamasi hutan
Pembinaan Penyelenggaraan Pengelolaan DAS	Terselenggaranya pengelolaan DAS secara terpadu pada DAS prioritas
Pengembangan Perhutanan Sosial	Meningkatnya pengelolaan hutan melalui pemberdayaan masyarakat
Perencanaan, Penyelenggaraan RHL, Pengembangan Kelembagaan dan Evaluasi DAS	Berkurangnya lahan kritis dan peningkatan pendapatan masyarakat

Substansi Inti : Pengendalian Kerusakan Lingkungan

Pengendalian Kerusakan Lingkungan : Penurunan beban pencemaran lingkungan melalui pengawasan ketaatan pengendalian pencemaran air limbah dan emisi di 680 kegiatan industri dan jasa pada 2010 dan terus berlanjut; penurunan jumlah *hotspot* kebakaran hutan sebesar 20% per tahun dan penurunan tingkat polusi keseluruhan sebesar 50% pada 2014; penghentian kerusakan lingkungan di 11 Daerah Aliran Sungai yang rawan bencana mulai 2010 dan seterusnya

Kegiatan Prioritas	Sasaran
Pengukuhan Kawasan Hutan	Terwujudnya kepastian kawasan hutan dan terlaksananya penatagunaan kawasan hutan
Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	Terwujudnya kepastian wilayah kelola KPH dan penyiapan areal pemanfaatan hutan
Penyiapan Pemantapan Kawasan Hutan	Terwujudnya kepastian kawasan hutan dalam mendukung pemantapan kawasan hutan
Pengendalian Kebakaran Hutan	Meningkatkan sistem pencegahan pemadaman, penanggulangan, dampak kebakaran hutan dan lahan
Pengembangan dan Pengelolaan Taman Nasional	Meningkatnya kapasitas kelembagaan pengelolaan TN, kelestarian kawasan dan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan
Pengembangan Pengelolaan Konservasi Sumberdaya Alam	Meningkatnya kapasitas kelembagaan pengelolaan kawasan konservasi dan ekosistem esensial, kelestarian kawasan dan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan
Pengembangan Penyuluhan Kehutanan	Meningkatnya sistem penyuluhan kehutanan yang aplikatif
Peningkatan Pelayanan Penyuluhan Kehutanan	Meningkatnya kesadaran dan partisipasi pelaku utama dan pelaku usaha serta peran penyuluh dalam pembangunan kehutanan
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Kehutanan dan SDM Kehutanan lainnya	Meningkatnya kualitas dan kapasitas aparatur Kemenhut serta SDM Kehutanan lainnya



Di dalam prioritas bidang, pembangunan kehutanan diklasifikasikan ke dalam bidang SDA dan LH, yang diarahkan untuk: (i) mendukung pembangunan perekonomian nasional, terutama dalam

meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mewujudkan daya saing ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat; serta (ii) meningkatkan pengelolaan SDA dan pelestarian LH untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. (Tabel 12).

Tabel 14. Prioritas Bidang pembangunan kehutanan 2013

Bidang : SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP		
Prioritas : Ketahanan pangan dan revitalisasi pertanian, perikanan dan kehutanan	Fokus Prioritas : Peningkatan Produksi dan Produktivitas untuk Menjamin Ketersediaan Pangan dan Bahan Baku Industri dari Dalam Negeri	Kegiatan Prioritas : Peningkatan Usaha Hutan Tanaman, Peningkatan Usaha Hutan Alam, Perencanaan Pemanfaatan dan Peningkatan Usaha Kawasan Hutan, Peningkatan Usaha Industri Primer Kehutanan, Pemantauan Usaha Kehutanan dan Pembinaan Ganis Wasganis PHPL, Pengembangan Perhutanan Sosial
	Fokus Prioritas: Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, dan Pemasaran Produk Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	Kegiatan Prioritas : Peningkatan Tertib Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Hasil Hutan, Penelitian dan Pengembangan Keteknikan Hutan dan Pengelolaan Hasil, Penelitian dan Pengembangan Produktifitas Hutan,
	Fokus Prioritas: Peningkatan Kapasitas Masyarakat Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan	Kegiatan Prioritas : Pengembangan Penyuluhan Kehutanan, Peningkatan Pelayanan Penyuluhan Kehutanan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Kehutanan dan SDM Kehutanan lainnya
Prioritas : Peningkatan konservasi dan rehabilitasi sumberdaya hutan	Fokus Prioritas : Perencanaan makro bidang kehutanan dan pemantapan kawasan hutan	Kegiatan Prioritas : Pengukuhan Kawasan Hutan, Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), Penyusunan Rencana Makro Kawasan Hutan, Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan, Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan di luar Kegiatan Kehutanan dan Penyiapan Pemantapan Kawasan Hutan
	Fokus Prioritas : Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan	Kegiatan Prioritas : Pengembangan Kawasan Konservasi, Ekosistem Esensial dan Pembinaan Hutan Lindung, Penyidikan dan Pengamanan Hutan, Pengembangan Konservasi Spesies dan Genetik, Pengendalian Kebakaran Hutan, Pengembangan Pemanfaatan Jasa Lingkungan, Pengembangan dan Pengelolaan Taman Nasional dan Pengembangan Pengelolaan Konservasi Sumberdaya Alam.
	Fokus Prioritas : Peningkatan fungsi dan daya dukung DAS berbasis pemberdayaan masyarakat	Kegiatan Prioritas : Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan, Pembinaan Penyelenggaraan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS), Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan dan Reklamasi Hutan, Perencanaan, penyelenggaraan RHL,

	Pengembangan Kelembagaan dan Evaluasi DAS, Perencanaan, Pengembangan Kelembagaan dan Evaluasi Hutan Mangrove, Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan dan Pengembangan Persuteraan Alam
Fokus Prioritas : Penelitian dan pengembangan Kementerian Kehutanan	Kegiatan Prioritas : Penelitian dan Pengembangan Konservasi dan Rehabilitasi, dan Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan Kehutanan

Pembangunan kehutanan tahun 2013 akan difasilitasi 8 program yang akan dilaksanakan masing-masing unit kerja Eselon I dengan penanggung jawab program adalah para pejabat eselon I lingkup Kemenhut, capaiannya diarahkan untuk memenuhi IKU tahun 2013. Selanjutnya, sesuai dengan Permenhut Nomor : P.65/Menhut-II/2011, kegiatan-kegiatan tahun 2013 dilaksanakan dengan semangat kesetaraan gender sehingga dapat mendorong kesadaran dan kepedulian terhadap isu gender dalam pembangunan.

B. PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2013

1. Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan



Program ini bertujuan untuk menyediakan data dan informasi SDH serta rencana makro penyelenggaraan kehutanan guna terwujudnya kemantapan kawasan hutan dalam unit-unit KPH, sehingga terdapat pengakuan atas status hukum dan fungsi kawasan hutan, serta terkendalinya penggunaan dan pemanfaatan kawasan.

Kegiatan	IKK	Pagu Anggaran (Rp. Juta)
a. Penyusunan Rencana Makro Kawasan Hutan	<ul style="list-style-type: none"> rencana makro penyelenggaraan kehutanan sebanyak 1 judul persetujuan substansi teknis kehutanan terhadap usulan revisi tata ruang di 26 provinsi sistem jaringan komunikasi data kehutanan LAN pusat dan WAN 17 provinsi sebanyak 1 sistem per tahun. 	22.442,46
b. Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	<ul style="list-style-type: none"> Keputusan Menteri Kehutanan tentang penetapan wilayah KPHL dan KPHP di seluruh Indonesia; Keputusan Menteri Kehutanan tentang penetapan wilayah KPHK di seluruh Indonesia KPH beroperasi sebanyak 30 unit (kumulatif menjadi 90 unit) Peraturan perundangan tentang penyelenggaraan KPH sebanyak 1 judul peta areal kerja dan peta pencadangan ijin pemanfaatan hutan selesai 80%. 	15.804,86
c. Pengukuhan Kawasan Hutan	<ul style="list-style-type: none"> terjaminnya tata batas kawasan hutan sepanjang 19.000 km, terdiri dari batas luar dan batas fungsi kawasan hutan penunjukan kawasan hutan provinsi selesai 75% penetapan kawasan hutan yang telah di tata batas temu gelang selesai 75% per tahun rekomendasi perubahan fungsi kawasan hutan secara parsial selesai 75% per tahun SK pelepasan kawasan hutan secara parsial selesai 75% per tahun. 	23.827,42
d. Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan	<ul style="list-style-type: none"> data dan informasi geospasial dasar dan tematik kehutanan terkini tingkat nasional sebanyak 1 judul data dan informasi sumberdaya hutan pada kawasan hutan tingkat nasional sebanyak 1 judul data dan informasi pendugaan karbon kawasan hutan tingkat nasional sebanyak 1 judul basis data spasial sumberdaya hutan yang terintegrasi sebanyak 1 kali <i>update</i>. 	15.167,30
e. Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> ijin pinjam pakai kawasan hutan terlayani 100% secara tepat waktu wajib bayar tertib membayar PNBK Penggunaan Kawasan Hutan minimal 80% per tahun data dan informasi penggunaan kawasan hutan di 33 provinsi peraturan perundangan penggunaan kawasan hutan, 1 judul. 	9.602,20
f. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen Planologi Kehutanan sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal di 23 satker 	82.647,49

Kegiatan	IKK	Pagu Anggaran (Rp. Juta)
Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> • tertib administrasi pengelolaan keuangan dan BMN di lingkungan Ditjen Planologi Kehutanan dalam rangka mewujudkan opini laporan keuangan Kemenhut “wajar tanpa pengecualian” sebanyak 23 Satker. 	
g. Penyiapan Pemantapan Kawasan Hutan	<ul style="list-style-type: none"> • tata batas kawasan hutan sepanjang 19.000 km • neraca sumberdaya hutan di 17 BPKH. 	538.091,69
		707.583,41

2. Peningkatan Usaha Kehutanan

Bertujuan untuk optimalisasi pengelolaan hutan produksi secara lestari, sehingga meningkatkan produksi dan diversifikasi hasil hutan serta memperluas kesempatan berusaha dan lapangan pekerjaan.



Kegiatan	IKK	Pagu Anggaran (Rp. Juta)
a. Perencanaan Pemanfaatan dan Peningkatan Usaha Kawasan Hutan	<ul style="list-style-type: none"> • terbentuknya KPHP di 18 provinsi sebesar 20% • tersedianya areal calon/usulan pemanfaatan hutan produksi dalam bentuk unit-unit usaha pada 26 provinsi sebesar 20% • produksi hasil hutan bukan kayu/jasa lingkungan sebesar 1%; • penerbitan IUPHHK-HA/RE pada areal bekas tebangan (LOA) seluas 650.000 ha 	11.562,19
b. Peningkatan Usaha Hutan Alam	<ul style="list-style-type: none"> • produksi hasil hutan kayu sebesar 1% • unit IUPHHK bersertifikat PHPL meningkat 10 % • produksi pennebangan bersertifikat legalitas kayu sebesar 10%. 	22.539,87
c. Peningkatan Usaha Hutan Tanaman	<ul style="list-style-type: none"> • penambahan luas areal pencadangan ijin usaha pemanfaatan HTI/HTR seluas 750.000 juta ha • penambahan areal tanaman pada HTI/HTR seluas 600.000 ha • sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari pada 10 unit manajemen hutan tanaman. 	23.176,20
d. Peningkatan Tertib Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> • PNBP dari investasi pemanfaatan hutan produksi meningkat sebesar 2% • implementasi SIM PUHH secara <i>online</i> di seluruh unit management IUPHHK dan IPHHK sebesar 80%. 	26.377,08
e. Peningkatan Usaha Industri Primer Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> • pemenuhan bahan baku dari hutan tanaman dan limbah (kumulatif) meningkat 60% • produk industri hasil hutan yang bersertifikat legalitas kayu meningkat 10% • efisiensi penggunaan bahan baku industri meningkat sebesar 2%. 	21.965,40
f. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> • tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen BUK sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal di 24 satker • dan tertib administrasi pengelolaan keuangan dan BMN di lingkungan Ditjen BUK dalam rangka mewujudkan opini laporan keuangan Kemenhut "wajar tanpa pengecualian" di 24 Satker. 	55.598,37
g. Pemantauan Usaha Kehutanan dan	<ul style="list-style-type: none"> • dokumen peredaran tertib sesuai peraturan perundangan minimal 90% di tahun 2014 • kualitas kinerja Ganis dan Wasganis meningkat minimal menjadi 55% di tahun 2014. 	146.173,01

Kegiatan	IKK	Pagu Anggaran (Rp. Juta)
Pembinaan Ganis Wasganis PHPL	<ul style="list-style-type: none"> pembangunan HTR seluas 80.000 ha 	
		307.392,14

3. Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan



Program ini bertujuan untuk meningkatkan 'kemandirian' pengelolaan kawasan konservasi, terwujudnya kelestarian keanekaragaman hayati, dan hak-hak negara atas kawasan dan hasil hutan, serta meningkatnya penerimaan negara dan masyarakat dari kegiatan konservasi sumberdaya alam.

Kegiatan	IKK	Pagu Anggaran (Rp. Juta)
a. Pengembangan Kawasan Konservasi, Ekosistem Esensial dan Pembinaan Hutan Lindung	<ul style="list-style-type: none"> terjaminnya konflik dan tekanan terhadap kawasan taman nasional dan kawasan konservasi lainnya (CA, SM, TB) dan HL menurun sebanyak 1% terjaminnya pengelolaan ekosistem esensial sebagai penyangga kehidupan meningkat 8% terjaminnya penanganan perambahan kawasan 	49.613,40

Kegiatan	IKK	Pagu Anggaran (Rp.Juta)
	<p>hutan kumulatif di 9 provinsi prioritas</p> <ul style="list-style-type: none"> • terjaminnya peningkatan efektifitas pengelolaan kawasan konservasi melalui pengelolaan berbasis resort kumulatif di 40 TN prioritas • terjaminnya peningkatan pengelolaan kawasan konservasi ekosistem gambut kumulatif di 6 provinsi • terjaminnya peningkatan pendapatan masyarakat di sekitar kawasan konservasi tertentu meningkat kumulatif sebesar 24%. 	
b. Pengembangan Konservasi Spesies dan Genetik	<ul style="list-style-type: none"> • terjaminnya populasi spesies prioritas utama yang terancam punah meningkat sebesar 0,5% (kumulatif 2% dari kondisi tahun 2008 sesuai ketersediaan habitat) • terjaminnya penangkaran dan pemanfaatan jenis keanekaragaman hayati secara lestari meningkat kumulatif 4%. 	18.210,00
c. Penyidikan dan Pengamanan Hutan	<ul style="list-style-type: none"> • terjaminnya kasus baru tindak pidana kehutanan (<i>illegal logging</i>, perambahan, perdagangan TSL ilegal, penambangan ilegal dan kebakaran) penanganannya terselesaikan minimal sebanyak 60% • terjaminnya tunggakan perkara (<i>illegal logging</i>, perambahan, perdagangan TSL ilegal, penambangan ilegal dan kebakaran) terselesaikan sebanyak 25% per tahun • terjaminnya kasus hukum perambahan kawasan konservasi terselesaikannya sebanyak 16% • peningkatan kapasitas penanganan kasus kejahatan kebakaran hutan di 10 provinsi. 	84.193,18
d. Pengendalian Kebakaran Hutan	<ul style="list-style-type: none"> • terjaminnya <i>hotspot</i> di Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera dan Pulau Sulawesi berkurang 59,2% dari rerata 2005-2009 • terjaminnya luas kawasan hutan yang terbakar ditekan hingga 40% dibanding kondisi rerata 2005-2009 • peningkatan kapasitas aparat pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bahaya kebakaran hutan di 24. 	186.059,87
e. Pengembangan Pemanfaatan Jasa Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • terjaminnya pengusaha pariwisata alam meningkat kumulatif 12 unit dibandingkan tahun 2008 • ijin usaha pemanfaatan jasa lingkungan air baru kumulatif 20 unit • terjaminnya PNPB dibidang pengusaha pariwisata alam meningkat 80% dibandingkan tahun 2008 • pelaksanaan <i>demonstration activity</i> REDD di 2 	18.980,00

Kegiatan	IKK	Pagu Anggaran (Rp.Juta)
	kawasan konservasi (hutan gambut) <ul style="list-style-type: none"> • terjaminnya kader konservasi (KK), Kelompok Pecinta Alam (KPA), Kelompok Swadaya Masyarakat/Kelompok Profesi (KSM/KP) yang dapat diberdayakan meningkat 8% dari tahun 2009. 	
f. Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam	<ul style="list-style-type: none"> • tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen PHKA sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal di 81 satker • tertib administrasi pengelolaan keuangan dan BMN di lingkungan Ditjen PHKA dalam rangka mewujudkan opini laporan keuangan Kemenhut "wajar tanpa pengecualian" di 81 Satker; dan terbangunnya persiapan sistem pengelolaan BLU di 3 UPT PHKA. 	69.773,77
g. Pengembangan dan Pengelolaan Taman Nasional	<ul style="list-style-type: none"> • konflik dan tekanan terhadap kawasan taman nasional menurun sebanyak 1% • peningkatan efektifitas pengelolaan kawasan konservasi melalui pengelolaan berbasis resort kumulatif di 40 TN • kasus baru tindak pidana kehutanan (<i>illegal logging</i>, perambahan, perdagangan TSL ilegal, penambangan ilegal dan kebakaran) penanganannya terselesaikan minimal sebanyak 60% • tunggakan perkara (<i>illegal logging</i>, perambahan, perdagangan TSL ilegal, penambangan ilegal dan kebakaran) terselesaikan sebanyak 25% per tahun • kasus hukum perambahan kawasan konservasi terselesaikannya sebanyak 16% • populasi spesies prioritas utama yang terancam punah meningkat sebesar 0,5% (kumulatif 2% dari kondisi tahun 2008 sesuai ketersediaan habitat) • <i>hotspot</i> di Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera dan Pulau Sulawesi berkurang kumulatif menjadi 59,2% dari rerata 2005-2009 • luas kawasan hutan yang terbakar ditekan hingga 40% dibanding kondisi rerata 2005-2009 • pengusaha pariwisata alam meningkat sebesar 45% dibandingkan tahun 2008 • PNBP dibidang pengusaha pariwisata alam meningkat 80% dibandingkan tahun 2008 • peningkatan pemberdayaan masyarakat dan wisata alam di sekitar taman nasional • tersedianya dokumen program dan anggaran serta laporan evaluasi dan keuangan di seluruh 	734.635,72

Kegiatan	IKK	Pagu Anggaran (Rp.Juta)
	Indonesia	
h. Pengembangan Pengelolaan Konservasi Sumberdaya Alam	<ul style="list-style-type: none"> • konflik dan tekanan terhadap kawasan CA, SM, TB dan HL menurun sebanyak 1% • pengelolaan ekosistem esensial sebagai penyangga kehidupan meningkat 8% • kasus baru tindak pidana kehutanan (<i>illegal logging</i>, perambahan, perdagangan TSL ilegal, penambangan ilegal dan kebakaran) penanganannya terselesaikan minimal sebanyak 60% • tunggakan perkara (<i>illegal logging</i>, perambahan, perdagangan TSL ilegal, penambangan ilegal dan kebakaran) terselesaikan sebanyak 25% per tahun • kasus hukum perambahan kawasan konservasi terselesaikannya sebanyak 16% • populasi spesies prioritas utama yang terancam punah meningkat sebesar 0,5% (kumulatif 2% dari kondisi tahun 2008 sesuai ketersediaan habitat) • <i>hotspot</i> di Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera dan Pulau Sulawesi berkurang 59,2% dari rerata 2005-2009 • luas kawasan hutan yang terbakar ditekan hingga 40% dibanding kondisi rerata 2005-2009 • pengusaha pariwisata alam meningkat sebesar 45% dibandingkan tahun 2008 • PNNP dibidang pengusaha pariwisata alam meningkat 80% dibandingkan tahun 2008 • peningkatan pemberdayaan masyarakat dan wisata alam di sekitar kawasan konservasi • tersedianya dokumen program dan anggaran serta laporan evaluasi dan keuangan seluruh Indonesia. 	618.660,78
		1.780.126,70



4. Peningkatan Fungsi dan DAS berbasis Pemberdayaan Masyarakat

Program ini bertujuan meningkatkan pengelolaan sumberdaya lahan oleh para pemangku kepentingan (pemerintah dan masyarakat) yang berbasis DAS dilakukan secara terintegrasi, sehingga berfungsi lebih efektif, serta perekonomian masyarakat berbasis usaha-usaha pengembangan komoditas kehutanan meningkat.

Kegiatan	IKK	Pagu Anggaran (Rp. Juta)
a. Pengembangan Perhutanan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> • terjaminnya HKm dan HD seluas 500.000 ha • terjaminnya ijin usaha pengelolaan HKm sebanyak 100 unit • terjaminnya kemitraan usaha HKm sebanyak 15 unit • terjaminnya dukungan ketahanan pangan di 6 provinsi • terjaminnya hutan rakyat untuk bahan baku kayu industri pertukangan seluas 50.000 ha • terjaminnya sentra HHBK unggulan terbentuk dan beroperasi di kabupaten. 	23.545,61
b. Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan	<ul style="list-style-type: none"> • terjaminnya areal sumber benih seluas 4.500 ha terkelola secara baik • terjaminnya areal sumber benih baru seluas 1.200 ha terbangun • terjaminnya pengembangan <i>seed for people</i> 20 lokasi • terjaminnya sentra bibit 3 unit. 	23.469,85
c. Pembinaan Penyelenggaraan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	<ul style="list-style-type: none"> • terjaminnya rencana pengelolaan DAS terpadu di 2 unit DAS prioritas • terjaminnya <i>baseline</i> data pengelolaan DAS di 36 BPDAS • terjaminnya data dan peta lahan kritis di 36 BPDAS tersedia. 	19.127,45

Kegiatan	IKK	Pagu Anggaran (Rp. Juta)
d. Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan dan Reklamasi Hutan	<ul style="list-style-type: none"> • terjaminnya tanaman rehabilitasi hutan pada DAS prioritas seluas 100.000 ha • terjaminnya tanaman rehabilitasi lahan kritis pada DAS prioritas seluas 399.000 ha • terjaminnya hutan kota seluas 1000 ha 	43.366,39
e. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> • tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen BPDASPS sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal di 50 satker • tertib administrasi pengelolaan keuangan dan BMN di lingkungan Ditjen BPDASPS dalam rangka mewujudkan opini laporan keuangan Kemenhut "wajar tanpa pengecualian" di 50 Satker. 	291.191,38
f. Perencanaan, penyelenggaraan RHL, pengembangan kelembagaan dan evaluasi DAS	<ul style="list-style-type: none"> • tanaman rehabilitasi hutan dan lahan kritis termasuk hutan mangrove, pantai, gambut dan rawa pada DAS Prioritas seluas 500.000 ha • terbangunnya HKm dan HD seluas 500.000 ha • sentra HHBK Unggulan terbentuk dan beroperasi di 6 lokasi • terbangunnya hutan rakyat kemitraan untuk bahan baku industri pertukangan seluas 50.000 ha • rencana pengelolaan DAS terpadu pada 2 unit DAS prioritas. 	2.325.664,01
g. Perencanaan, pengembangan kelembagaan dan evaluasi hutan mangrove	<ul style="list-style-type: none"> • Rencana RTkRHL Mangrove 1 kegiatan • terbentuk dan berfungsinya kelompok kerja mangrove daerah di 8 provinsi • data informasi evaluasi pengelolaan hutan mangrove 1 kegiatan. 	21.493,32
h. Penyelenggaraan perbenihan tanaman hutan	<ul style="list-style-type: none"> • areal sumber benih seluas 4.500 ha terkelola secara baik • areal sumber benih baru seluas 1.200 ha • pengembangan <i>Seed for People</i> 80 lokasi; dan terbangunnya sentra bibit 3 Unit. 	84.267,71
i. Pengembangan Persuteraan Alam	<ul style="list-style-type: none"> • jumlah unit usaha persuteraan alam meningkat sebesar 5 unit • peningkatan produksi sutera alam segmen hulu sebesar 8%. 	20.721,61
		2.852.847,33



5. Penyuluhan dan pengembangan SDM kehutanan

Tujuan dari program ini adalah meningkatkan peran serta pelaku utama dan pelaku usaha melalui upaya penyuluhan, serta peningkatan kapasitas aparatur Kemenhut dan SDM kehutanan lainnya.

Kegiatan	IKK	Pagu Anggaran (Rp. Juta)
a. Pengembangan penyuluhan kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> • peningkatan efektifitas penyuluhan kehutanan melalui penyusunan program penyuluhan kehutanan nasional sebanyak 1 dokumen • sertifikasi penyuluh kehutanan sejumlah 500 orang; dan Kampanye Indonesia Menanam (KIM) di 33 provinsi. 	34.324,06
b. Peningkatan pelayanan penyuluhan kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> • kelompok masyarakat produktif mandiri, sejumlah 100 kelompok • peningkatan kapasitas penyuluh kehutanan sejumlah 1.000 orang. 	53.600,51
c. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementrian Kehutanan dan SDM Kehutanan Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> • pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, teknis dan administrasi kehutanan minimal sebanyak 3.000 orang peserta • pendidikan menengah kejuruan kehutanan sebanyak 285 siswa • pendidikan pasca sarjana jenjang S2 dan S3 sebanyak 65 orang lulusan • sertifikasi ISO 9001 : 2008 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kehutanan sejumlah 1 unit. 	187.437,27
d. Dukungan manajemen dan	<ul style="list-style-type: none"> • tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan sesuai 	22.509,07

Kegiatan	IKK	Pagu Anggaran (Rp. Juta)
pelaksanaan tugas teknis lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan	kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal di 17 satker <ul style="list-style-type: none"> • tertib administrasi pengelolaan keuangan dan BMN di lingkungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan dalam rangka mewujudkan opini laporan keuangan Kemenhut “wajar tanpa pengecualian” di 17 Satker • terbentuknya 13 kerjasama kemitraan melalui peningkatan peran serta pelaku utama dan pelaku usaha dalam pemberdayaan masyarakat • terbentuknya kelembagaan penyuluhan di 1 provinsi dan 15 kab /kota. 	297.870,90



6. Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kehutanan

Program ini bertujuan terwujudnya manajemen penelitian dan pengembangan yang efektif dan efisien, serta penyediaan produk iptek kehutanan sebagai dasar penetapan kebijakan dan pelaksanaan teknis pengelolaan hutan.

Kegiatan	IKK	Pagu anggaran (Rp. Juta)
a. Penelitian dan Pengembangan Konservasi dan Rehabilitasi	<ul style="list-style-type: none"> iptek dasar dan terapan yang dihasilkan dibidang konservasi dan rehabilitasi sebanyak 7 judul, yaitu teknik rehabilitasi hutan bekas tebangan, teknik penanaman dan rehabilitasi mangrove, teknik pengelolaan hutan rawa gambut ramah lingkungan, teknik konservasi flora, fauna dan mikoorganisme, teknik pengelolaan dan pemanfaatan kawasan konservasi secara lestari, sistem pengelolaan DAS lintas sektoral dan wilayah administrasi, teknik rehabilitasi dan restorasi lahan bekas tambang iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna dibidang konservasi dan rehabilitasi sebanyak 7 judul. 	94.736,70
b. Penelitian dan Pengembangan Peningkatan Produktivitas Hutan	<ul style="list-style-type: none"> iptek dasar dan terapan yang dihasilkan dibidang produktifitas hutan sebanyak 6 judul, yaitu teknik peningkatan produktifitas hutan tanaman penghasil kayu pertukangan, teknik peningkatan produktifitas hutan tanaman penghasil pulp, teknik peningkatan produktifitas jenis-jenis tanaman kayu energi, teknik penyediaan benih unggul, teknik peningkatan produktifitas dan nilai ekonomi HHBK FEM (<i>food, energy, medicine</i>), teknik peningkatan produktifitas dan kualitas produk HHBK non FEM (gaharu, cendana, gemor, sutera, lebah madu, rusa) iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna dibidang produktifitas hutan sebanyak 6 judul. 	97.994,60
c. Penelitian dan Pengembangan Keteknikan Hutan dan Pengolahan Hasil Hutan	<ul style="list-style-type: none"> iptek dasar dan terapan yang dihasilkan dibidang keteknikan kehutanan dan pengolahan hasil hutan sebanyak 5 judul, yaitu informasi tentang sifat dasar dan kegunaan kayu sesuai tujuan pemakaiannya, teknik pemanenan hutan ramah lingkungan, teknik pemanfaatan dan peningkatan kualitas kayu serta standarisasi produk kayu, teknik pengolahan pemanfaatan dan diversifikasi produk HHBK, terobosan perekayasaan alat dan teknik substitusi bahan pembantu industri perkayuan iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna bidang keteknikan kehutanan dan pengolahan hasil hutan sebanyak 5 judul . 	32.804,20
d. Penelitian dan Pengembangan Perubahan	<ul style="list-style-type: none"> iptek dasar dan terapan yang dihasilkan dibidang perubahan iklim dan kebijakan kehutanan sebanyak 7 judul, yaitu strategi kebijakan bagi pengambil keputusan (<i>decision support system, DSS</i>) dalam penataan ruang dan penatagunaan 	23.935,30

Kegiatan	IKK	Pagu anggaran (Rp. Juta)
Iklm dan Kebijakan Kehutanan	<p>hutan berbasis DAS, strategi kebijakan (DSS) pengembangan hutan kota, kebijakan pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, teknik perhitungan emisi dan serapan gas rumah kaca (GRK) kehutanan, strategi kebijakan adaptasi terhadap perubahan iklim, strategi penguatan tata kelola kehutanan dan kinerja Kemenhut, dan strategi penguatan tata kelola industri dan perdagangan hasil hutan</p> <ul style="list-style-type: none"> • iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna dibidang perubahan iklim dan kebijakan kehutanan sebanyak 7 judul. 	
e. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan tugas Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> • tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Badan Litbang Kehutanan sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal di 20 satker • tertib administrasi pengelolaan keuangan dan BMN di lingkungan Litbang Kemenhut dalam rangka mewujudkan opini laporan keuangan Kemenhut “wajar tanpa pengecualian” mulai laporan keuangan tahun 2011 sebanyak 20 Satker • pengelolaan KHDTK. 	37.320,38
		286.491,18



7. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kehutanan

Program ini bertujuan peningkatan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan efisien.

Kegiatan	IKK	Pagu Anggaran (Rp. Juta)
a. Pengawasan Terhadap Kinerja, Keuangan dan Administrasi pada Wilayah Kerja Inspektorat I	<ul style="list-style-type: none"> • kelemahan administrasi di wilayah kerja Inspektorat I diturunkan sampai 40% • pelanggaran terhadap peraturan perundangan di wilayah kerja Inspektorat I berkurang sampai 40% • hambatan kelancaran pelaksanaan tugas di wilayah kerja Inspektorat I berkurang hingga 40% dari tahun 2009. 	4.590,00
b. Pengawasan Terhadap Kinerja, Keuangan dan Administrasi pada Wilayah Kerja Inspektorat II	<ul style="list-style-type: none"> • kelemahan administrasi di wilayah kerja Inspektorat II diturunkan sampai 40% dari tahun 2009 • pelanggaran terhadap peraturan perundangan di wilayah kerja Inspektorat II berkurang sampai 40% dari tahun 2009 • hambatan kelancaran pelaksanaan tugas di wilayah kerja Inspektorat II berkurang hingga 40% dari tahun 2009. 	5.040,00
c. Pengawasan Terhadap Kinerja, Keuangan dan Administrasi pada Wilayah Kerja Inspektorat III	<ul style="list-style-type: none"> • kelemahan administrasi di wilayah kerja Inspektorat III diturunkan sampai 40% dari tahun 2009 • pelanggaran terhadap peraturan perundangan di wilayah kerja Inspektorat III berkurang sampai 40% dari tahun 2009 • hambatan kelancaran pelaksanaan tugas di wilayah kerja Inspektorat III berkurang hingga 40% dari tahun 2009. 	5.400,00
d. Pengawasan Terhadap Kinerja, Keuangan dan Administrasi pada Wilayah Kerja Inspektorat IV	<ul style="list-style-type: none"> • kelemahan administrasi di wilayah kerja Inspektorat IV diturunkan sampai 40% dari tahun 2009 • pelanggaran terhadap peraturan perundangan di wilayah kerja Inspektorat IV berkurang sampai 40% dari tahun 2009 • hambatan kelancaran pelaksanaan tugas di wilayah kerja Inspektorat IV berkurang hingga 40% dari tahun 2009 	5.220,00
e. Pengawasan Terhadap Kasus Pelanggaran Yang Berindikasi KKN	<ul style="list-style-type: none"> • potensi kerugian negara dapat diturunkan hingga 20% dari temuan tahun 2006-2009. 	3.600,00
f. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> • tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Itjen Kemenhut sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal di 6 satker; dan tertib administrasi pengelolaan keuangan dan BMN di lingkungan Itjen Kemenhut dalam rangka 	38.201,42

Kegiatan	IKK	Pagu Anggaran (Rp. Juta)
Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan	mewujudkan opini laporan keuangan Kemenhut “wajar tanpa pengecualian” di 6 Satker.	
		62.051,42

8. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kehutanan.

Program ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola administrasi penyelenggaraan pemerintahan Kementerian Kehutanan secara efektif dan efisien.

Kegiatan	IKK	Pagu Anggaran (Rp. Juta)
a. Koordinasi Perencanaan dan Evaluasi Kementerian Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> • penyerapan anggaran meningkat minimal 87% • pencapaian sasaran strategis minimal 72% • model implementasi kebijakan kehutanan di 3 kabupaten 	46.823,52
b. Penyelenggaraan Administrasi dan Penataan Kepegawaian.	<ul style="list-style-type: none"> • pelayanan administrasi kepegawaian minimal 92% akurat dan tepat waktu • prasarat pengembangan kapasitas dan karir pegawai minimal terpenuhi 92% • data kepegawaian dalam SIMPEG minimal 95% sesuai dengan data yang dimiliki individu PNS. 	15.712,59
c. Penyelenggaraan dan Pembinaan Tata Hukum dan Organisasi Kementerian Kehutanan.	<ul style="list-style-type: none"> • penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan lingkup Kemenhut minimal sebesar 60% • pencapaian penelaahan hukum peraturan perundang-undangan lingkup Kemenhut minimal sebesar 64% • penanganan perkara, pemulihan hal-hak negara bidang kehutanan minimal menang sebesar 64% • pencapaian pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan lingkup Kemenhut minimal sebesar 56%. 	10.135,76
d. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Kementerian Kehutanan.	<ul style="list-style-type: none"> • pengembalian pinjaman/piutang sebanyak 69 unit perusahaan terselesaikan KUK-DAS, KUHR dan KUPA serta PSDH DR sebesar 60% • opini laporan keuangan Kementerian Kehutanan “wajar tanpa pengecualian” 	62.210,05

Kegiatan	IKK	Pagu Anggaran (Rp. Juta)
	<ul style="list-style-type: none"> • PNBPN sebesar Rp. 2,75 Triliun. 	
e. Penyelenggaraan Ketatausahaan, Kerumahtanggaan dan Pengelolaan Perlengkapan Kementerian Kehutan.	<ul style="list-style-type: none"> • SIMAK BMN Kementerian Kehutan akuntabel dan tepat waktu sebanyak 225 satuan kerja • sertifikasi ahli pengadaan barang dan jasa bagi pejabat pembuat komitmen (PPK) dan panitia/pejabat pengadaan di Kementerian Kehutan sebanyak 200 orang • Sertifikasi Aset Tanah Kementerian Kehutan seluas 3.700.811 m² yang belum mempunyai bukti kepemilikan yang sah • Penyelesaian Status BMN eks Kanwil di 15 Provinsi 	174.271,06
f. Pembinaan Standardisasi, Pengelolaan Lingkungan dan Penanganan Perubahan Iklim Kehutan.	<ul style="list-style-type: none"> • standard produk dan jasa kehutan, serta pedoman pengelolaan lingkungan dan perubahan iklim 7 judul • sertifikasi pengelolaan hutan milik rakyat 3 unit • rekomendasi kebijakan penanganan perubahan iklim kehutan sebanyak 1 paket. 	18.354,43
g. Pembinaan dan Koordinasi Kerjasama Luar Negeri.	<ul style="list-style-type: none"> • komitmen kerjasama internasional di bidang kehutan (bilateral, multilateral, regional, dan multipihak) sebanyak 1 paket • kerjasama baru bilateral sebanyak 1 negara 	21.505,66
h. Penyiaran dan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Kehutan.	<ul style="list-style-type: none"> • meningkatnya citra positif Kemenhut sebesar 40% • meningkatnya berita kegiatan pimpinan Kemenhut sebesar 40% • meningkatnya publikasi kebijakan program pembangunan kehutan sebesar 40% • hubungan dengan lembaga tinggi negara, pemerintah dan lembaga non pemerintah meningkat sebesar 40%. 	29.732,58
i. Pengelolaan Keuangan, Penyaluran dan Pengembalian Dana Bergulir Pembiayaan Pembangunan Kehutan.	<ul style="list-style-type: none"> • kredit pembangunan hutan tanaman (hutan tanaman rakyat, hutan tanaman industri, hutan rakyat, hutan desa dan hutan kemasyarakatan) seluas 80.000 ha • pemahaman terhadap skim pinjaman pembangunan hutan tanaman di 12 kabupaten • peningkatan penguatan kelembagaan 	20.100,00

Kegiatan	IKK	Pagu Anggaran (Rp. Juta)
	debitur di 3 kabupaten.	
j. Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional I.	• pelaksanaan pembangunan kehutanan di regional I berjalan minimal 72%.	6.043,28
k. Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional II.	• pelaksanaan pembangunan kehutanan di regional II berjalan minimal 72%.	6.235,38
l. Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional III.	• pelaksanaan pembangunan kehutanan di regional III berjalan minimal 72%.	5.121,88
m. Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional IV.	• pelaksanaan pembangunan kehutanan di regional IV berjalan minimal 72%.	6.888,88
		423.135,07



PENUTUP



Renja Kemenhut 2013 merupakan pedoman seluruh elemen aparatur Kemenhut, yang harus diacu dan disusun langkah-langkah pencapaiannya untuk tingkat program pada unit kerja eselon I (Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal dan Badan) di lingkungan Kemenhut. Hasil-hasil dari upaya pencapaian sasaran yang telah ditetapkan di dalam Renja ini selanjutnya dituangkan ke dalam bentuk dokumen anggaran (Rencana Kerja Anggaran/RKA dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Kemenhut 2013). Dengan demikian, RKA dan DIPA, senantiasa merupakan bentuk intervensi anggaran dalam pencapaian IKU Kemenhut tahun 2013.

Selanjutnya, untuk menunjukkan komitmen seluruh elemen Kemenhut dalam pembangunan kehutanan akan disusun penetapan kinerja yang akan ditandatangani oleh pimpinan di semua level (Pejabat Eselon I, II, III dan IV) di seluruh unit kerja. Hal ini dilakukan untuk menuntun setiap gerak langkah pelaksanaan tugas fungsi yang senantiasa mengarah pada capaian hasil dan berorientasi kinerja, dan pada gilirannya akan dievaluasi serta dilaporkan dalam LAKIP Kemenhut tahun 2013.

**MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ZULKIFLI HASAN, SE., MM